



Media: Merapi

Hari: Jumat

Tanggal: 19 November 2021

Halaman: 2

PEMERINTAH TERAPKAN PPKM LEVEL 3 SAAT NATARU

Pemda DIY Tunggu Arahan Pusat

YOGYA (MERAPI) - Pemerintah menetapkan kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) level 3 pada libur Natal dan Tahun Baru (Nataru) di seluruh wilayah Indonesia.

Aturan PPKM level 3 saat libur Nataru berlaku mulai 24 Desember 2021 sampai 2 Januari 2022. Kebijakan dilakukan untuk memutus rantai persebaran Covid-19 namun di sisi lain agar ekonomi terus bergerak.

Gubernur DIY, Sri Sultan HB X mengatakan belum ada ketentuan dan arahan yang mengatur kebijakan pemberlakuan PPKM level 3 saat Nataru. "Ya belum ada ketentuannya kok. Kita belum tau persis," ujar Sultan, Kamis (18/11)

di Kantor Gubernur DIY.

Sultan mengatakan pemerintah daerah diminta tetap melakukan upaya antisipasi untuk mencegah terjadinya persebaran virus. "Ya tetep sama kita suruh antisipasi itu saja," imbuh Sultan.

Sekretaris Daerah (Sekda) DIY, Baskara Aji mengatakan adanya kebijakan PPKM level 3 bertujuan agar Pemerintah Daerah dapat melakukan pengetatan dan pembatasan. "Dengan level 3, daerah bisa membuat regulasi khusus un-



MERAPI/WULAN YANUARWATI
Sri Sultan HB X

tuk melakukan pengetatan-pengetatan supaya tidak terjadi (penambahan) konfirmasi positif gitu," ujarnya. Aji menyebut kebijakan di-

lakukan pemerintah tentu dengan mempertimbangan banyak hal, salah satunya agar Pemerintah Daerah dapat membuat kebijakan yang disesuaikan dengan kondisi.

"Kalau kemudian pemerintah mau melakukan itu saya kira pertimbangan di situ supaya daerah-daerah punya kewenangan supaya bisa mengatur sesuai kondisi," imbuhnya.

Dari segi sektor pariwisata, Aji menyebutkan Pemda kemudian dapat mengatur durasi dan kedatangan, bukan lantas melarangnya. Sebab Nataru selalu diindikasikan dengan kedatangan wisatawan ke Yogya.

"Mengatur bukan melarang orang datang tetapi kita mel-

kukan pembatasan-pembatasan jumlahnya, durasi kedatangan (wisatawan) karena (libur) Nataru itu wisatawan nek (kalau) lebaran mudik dan Yogya itu sasaran Nataru," jelasnya.

Saat ini penutupan Pariwisata tidak mungkin dilakukan sebab berdampak pada berbagai aspek termasuk pada pertumbuhan ekonomi sehingga yang bisa dilakukan ialah membatasi dengan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat.

"Bukan ditutup tapi diatur, kita gak mungkin lagi sekarang nutup pariwisata. Tapi kita mengatur supaya ada pembatasan, tidak ada kerumunan kemudian tidak ada pelanggaran terhadap protokol kesehatan," jelasnya.

(C-4)-d

Instansi	Sifat	Tindak Lanjut
1.		☐ Untuk Ditanggapi
2.		☐ Untuk Diketahui

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 Juli 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005